

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM *SOCIAL STUDIES* SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER CERDAS BAGI GENERASI MUDA PADA MASA GLOBAL

Oleh:

Hasni¹, Sapriya², Erlina Wiyanarti³

^{1, 2, 3}Universitas Pendidikan Indonesia

¹hasni@upi.edu; ²sapriya@upi.edu; ³erlina.wiyanarti93@gmail.com

ABSTRAK: Ruang lingkup kajian pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian yang bersifat *multifacet* dengan konteks lintas bidang keilmuan. Dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam *social studies* dengan baik dan benar diharapkan generasi penerus bangsa Indonesia akan memiliki karakter cerdas (*smart*), memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, melakukan *transfer of learning* (proses pembelajaran diri), *transfer of values* (proses penjawantahan nilai-nilai), dan *transfer of principles* (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM, dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata. Metode dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dengan mengkaji lembar-lembar pustaka dari berbagai kriteria mulai dari buku, jurnal atau artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam *social studies* adalah sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan dengan menanamkan kepada anak didik suatu komitmen dasar tentang nilai-nilai kemasyarakatan yaitu nilai pengetahuan, tingkah laku dan nilai-nilai kekayaan budaya serta membantu anak didik untuk mengembangkan kemampuannya untuk mengaplikasikan nilai-nilai kemasyarakatan tersebut. Sedangkan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam *social studies* sebagai pembentukan karakter cerdas bagi generasi muda pada masa global adalah warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (*civic confidence*), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menjadi warga negara yang mampu (*civic competence*), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (*civic commitment*), sehingga warga negara atau generasi muda yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara *smart* dan *good citizenship*.

KATA KUNCI: *Pendidikan Kewarganegaraan, Social Studies, Karakter Cerdas*

ABSTRACT: The scope of the study of civic education is a multifaceted field of study with a cross-scientific context. With Citizenship Education in social studies properly and correctly it is hoped that the next generation of the Indonesian nation will have a smart character (smart), have the ability to make changes in society, transfer of learning (self-learning process), transfer of values. values), and the transfer of principles (the process of transferring the principles) of democracy, human rights, and civil society in real life. The method in this research is the literature study method by examining the bibliography sheets of various criteria ranging from books, journals or articles. The results showed that civic education in social studies is the inheritance of citizenship values by instilling in students a basic commitment to social values, namely the value of knowledge, behavior and values of cultural wealth and helping students to develop their ability to apply these values. Meanwhile, the urgency of citizenship education in social studies as the formation of intelligent character for the young generation in the global era is citizens who have the

knowledge and attitude of citizenship will become confident citizens (civic confidence), citizens who have the knowledge and skills to become capable citizens. (civic competence), citizens who have citizenship attitudes and skills will become citizens who are committed (civic commitment), so that citizens or young people who have the knowledge, attitudes and skills of citizenship will become smart citizens and good citizenship.

KEYWORDS: Citizenship Education, Social Studies, Intelligent Character

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya dan pengaruh-pengaruh positif dari Pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang diproses guna melatih para peserta untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Somantri et al., 2001). Ruang lingkup kajian *Civic Education* merupakan bidang kajian yang bersifat *multifacet* dengan konteks lintas bidang keilmuan. Menurut Chreshore dalam (Sapriya, 2011), bahwa *Civic Educatioan* memiliki objek kajian pokok ilmu politik, khususnya konsep demokrasi politik (*political democracy*) untuk hak dan kewajiban (*duties and rights of citizens*).

Dalam konteks Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa: "Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Nasional, 2003).

Relevan dengan fungsi Pendidikan dalam Undang-undang tersebut di atas, maka *Civic Education* bertujuan untuk membangun karakter (*character building*) bangsa atau generasi muda yang antara lain: (a) membentuk kecakapan partisipatif warga Negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (b) menjadikan warga Negara Indonesia yang cerdas, aktif, kreatif dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa, (c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab (Kamaruddin Hidayat, 2008).

Sebagai suatu bidang ilmu, menurut Barr, Bart dan Shermis dalam (Sapriya, 2011) maka *Civic Eeducation* merupakan pengembangan salah satu dari lima tradisi *Social Studies* yaitu transmisi kewarganegaraan (*Citizenship Transmision*) yang sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai *Citizenship Education*. Perkembangan tradisi tersebut terdiri dari: domain akademisi, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001). Dengan demikian *Civic Education* menempati posisi yang urgen dalam *Social Studies* yang memiliki basis tradisi disiplin ilmu, sehingga pengajaran IPS (Ilmu

Pengetahuan Sosial) sebagai transmisi kewarganegaraan memandang bahwa cara mengajarkan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) berkaitan dengan penanaman tingkah laku, pengetahuan, pandangan dan nilai yang harus dimiliki para peserta didik di sekolah yang merupakan kekayaan budaya ini harus ditransmisikan kepada generasi selanjutnya dalam proses pendidikan yang dilaksanakan (Sariyatun., 2019).

Istilah IPS menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam penjelasan kurikulum 2013 dikembangkan sebagai mata pelajaran *integrative social studies* bukan sebagai disiplin ilmu, melainkan sebagai pendidikan orientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berfikir, kemampuan belajar rasa ingin tahu dan pengembangan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam (Amanullah et al., 2019). Sedangkan menurut Nursid Sumaatmadja dalam Idad Suhada *Social Studies* (Studi Sosial) berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Studi Sosial bukan merupakan bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang kajian tentang segala gejala dan masalah sosial, dalam mengkaji masalah sosial tentunya studi sosial lebih bersifat praktis dari pada akademis-teoritis (Suhada, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dengan kajian bahwa pada hakikatnya, objek kajian pendidikan kewarganegaraan adalah perilaku warga negara (Sapriya, 2007).

Dalam materi pembelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) baik di Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki kesamaan adalah untuk mengkaji seperangkat peristiwa berupa fakta, konsep, generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Melalui hasil kajian (Amanullah et al., 2019), bahwa mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) maka peserta didik diarahkan menjadi

warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, dan cinta damai.

Menurut Sanusi dan Sumantri dalam Sariyatun Pendidikan IPS di sekolah-sekolah yang diajarkan di Indonesia pada prinsipnya identik dengan Studi Sosial (*Social Studies*) yang diajarkan di sekolah-sekolah luar Negeri, terutama di Amerika Serikat tetapi isi kontennya di samakan dengan karakteristik atau kondisi di Indonesia (Sariyatun., 2019). Secara lebih khusus, bahwa pendidikan IPS memuat tiga sub tujuan yaitu sebagai kewarganegaraan, sebagai ilmu konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu sosial; sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat kemudian dikaji secara reflektif (Sariyatun., 2019).

Dengan demikian, setelah peserta didik atau generasi muda mendapatkan pendidikan kewarganegaraan dalam *social studies* dengan baik dan benar diharapkan mereka akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang memiliki karakter cerdas (*smart*), memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, melakukan *transfer of learning* (proses pembelajaran diri), *transfer of values* (proses penjawantahan nilai-nilai), dan *transfer of principles* (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM, dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata (Kamaruddin Hidayat, 2008).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas kajian dalam tulisan ini secara khusus hanya mengkaji salah satu tujuan IPS adalah IPS yang diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan (*citizenship transmission*). Oleh karena itu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pewarisan nilai kewarganegaraan dalam *social studies* dan bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam *social studies* sebagai upaya pembentukan karakter cerdas bagi generasi muda pada masa global.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka dengan mengkaji lembar-lembar pustaka dari berbagai kriteria mulai dari buku, jurnal atau artikel. Menurut (Mestika, 2014) bahwa penelitian kepustakaan sendiri menekankan pada usaha peneliti dalam menggunakan sumber dengan cara yang profesional dan jeli mulai dari membuat catatan penelitian sampai pada bibliografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pewarisan Nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam *Social Studies*

Konsep Kewarganegaraan (*Citizenship*) adalah materi yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Susanto, 2014).

Dalam era global saat ini dengan persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan nilai melalui materi Pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan untuk menangkal kesemrawutan krisis multi dimensional. Manusia khususnya generasi muda memerlukan kematangan moral dan intelektual, kecerdasan intelektual dalam mengkritisi berbagai wacana pemikiran yang muncul di kalangan publik, kematangan emosional untuk dapat hidup kooperatif sekaligus kompetitif yang didasarkan atas jalinan sosial yang harmonis dan kematangan spiritual sebagai perwujudan ikatan transedental antara dirinya dengan Tuhan Yang Maha

Esa. Kematangan tersebut perlu dilatih, diajar dan didik melalui Pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan pendidikan berbasis nilai (Ine Kusuma & Markum Susatim, 2010).

Dengan munculnya perubahan yang dapat terjadi secara nasional, maupun internasional, maka *civic education* (pendidikan kewarganegaraan) memiliki peran yang penting untuk memperkuat rasa identitas nasional setiap bangsa agar tidak dengan mudah terbawa arus perubahan yang terjadi. Istilah kewarganegaraan multidimensi dapat dilihat melalui empat dimensi yaitu dimensi personal, sosial, spasial, dan temporal. Dimensi personal meliputi kapasitas personal dan komitmen terhadap etika warga negara yang dikarakteristikkan oleh kebiasaan tanggung jawab pikiran, perasaan dan tindakan secara individu maupun sosial. Dimensi sosial menekankan pada aktivitas sosial yang melibatkan orang lain untuk hidup dan bekerja sama untuk kewarganegaraan. Dimensi spasial mengharuskan untuk mampu hidup dan bekerja pada tingkat lokal, regional, nasional, dan multinasional. Dimensi temporal menekankan warga negara dalam menghadapi tantangan yang terjadi pada saat ini tidaklah hanya terkait dengan masa sekarang sehingga mereka lupa akan masa lalu dan masa yang akan datang (Wuryandani & Fathurrohman., 2012).

Menurut Jorolimek dan Parker 1993 dalam (Sapriya, 2011), bahwa bidang studi yang mempunyai tanggung jawab khusus terhadap *Civic Education* adalah *Social Studies* dalam hal ini relevan dengan Pendidikan IPS. Lebih lanjut dinyatakan bahwa *Social Studies* harus mampu mempersiapkan siswa agar menjadi: “*An informed person, skilled in the processes of a free society, who is committed to democratic values and is able, and feels obliged to participate in*

social, political, and economic processes”.

Dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merupakan inti dari pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) berdasarkan konsep *Social Studies* pada tataran konseptual dan praktis oleh (Barr, R.D., Barth, J.L, & Shermis, 1977) dikelompokkan dalam tiga tradisi pedagogis, adalah: (a) sebagai proses transmisi pendidikan kewarganegaraan (*citizenship transmission*), (b) sebagai pengembangan ilmu-ilmu sosial (*social science*) dan (c) sebagai cara berpikir kritis melalui penemuan.

Tradisi *citizenship transmission* merupakan tradisi tertua dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang isinya menekankan pada esensi mendapatkan pengetahuan sebagai “*self evident truth*” atau kebenaran yang diyakini sendiri. Karenanya tugas guru menurut tradisi ini adalah menyampaikan pengetahuan yang telah diyakini kebenarannya itu dengan cara kelangsungan hidup masyarakat yang diyakini dapat dipertahankan. Sedangkan tradisi *social science* merupakan tradisi yang dimotori oleh para sejarawan dan

ahli-ahli ilmu sosial dengan tujuan utama mengembangkan para peserta didik agar dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan metode dari disiplin ilmu-ilmu sosial sebagai sarana untuk menjadi warga negara yang efektif (Ine Kusuma & Markum Susatim, 2010).

Pembelajaran IPS sebagai tranmisi kewarganegaraan merupakan strategi pengajaran IPS yang berhubungan dengan penanaman tingkah laku, pengetahuan dan nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pewarisan nilai kewarganegaraan dalam Pendidikan IPS tujuannya adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik (Effendi, 2012). Menurut (Barr, R.D., Barth, J.L, & Shermis, 1977) bahwa dalam *citizenship transmission traditioan*, nilai-nilai-nilai tertentu dipandang sebagai “nilai-nilai yang baik” ditanamkan dalam upaya untuk mengajari peserta didik menjadi warga negara yang baik. Tradisi ini menggunakan pendekatan inklusi dalam pembelajaran. Berikut ini contoh pengajaran Pendidikan IPS sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan:

No.	Komponen	Uraian
1	Tujuan	Pewarisan nilai kewarganegaraan melalui penanaman nilai-nilai sebagai kerangka pembuatan keputusan
2	Metode	Pewarisan nilai dan konsep ditanamkan melalui teknik seperti <i>textbook</i> , ceramah, resitasi, tanya jawab dan latihan pemecahan masalah (<i>problem solving</i>)
3	Bahan	Diseleksi oleh guru yang memiliki otoritas dengan bahan menggunakan aspek nilai, keimanan dan sikap

Sumber (Effendi, 2012)

Dari contoh pembelajaran tersebut di atas, maka menurut penganut tradisi transmisi kewarganegaraan Pendidikan IPS memiliki dua tujuan pokok adalah sebagai berikut: (1) Menanamkan kepada anak didik suatu komitmen dasar tentang nilai-nilai kemasyarakatan. (2) Membantu anak didik untuk mengembangkan

kemampuannya untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut terhadap masalah yang dihadapi bangsa (Effendi, 2012).

Berdasarkan kajian penganut tradisi transimisi kewarganengaraan, maka dapat dianalisis bahwa komponen yang terpenting dari nilai-nilai itu ialah bagaimana supaya peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai tersebut secara

rasional dan kritis (*critical thinking*) atau secara *inquiri* khususnya diantara teman-temannya. Namun demikian pertimbangan dengan rasional dan kritis tidaklah memadai tanpa didukung oleh pertimbangan keimanan (*beliefs*), dan sikap (*attitudes*).

Dengan mengembangkan nilai pendidikan kewarganegaraan dalam Pendidikan IPS, maka setiap warga negara atau peserta didik akan menjadi warga negara yang baik (*to be good citizen*), adalah peserta didik yang memiliki kecerdasan (*civic intelligen*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*), serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Sapriya, 2011).

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam *Social Studies* sebagai Upaya Pembentukan Karakter Cerdas Bagi Generasi Muda Pada Masa Global

Berbagai isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat saat ini dan mendapat perhatian luas dari publik menjadi bagian dari reorganisasi materi, sehingga tuntutan publik terhadap berbagai perubahan struktur materi *Civic Education* dapat menciptakan materi kajian yang sistematis, *integrative*, *holistic* dan strategis (actual-empiris) yang berorientasi pada terwujudnya *responsibility, smart, and good citizenship* (Hamidi & Lutfi, 2010).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang yang multidisipliner. Sebagai bidang yang multidisipliner bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan karakter bangsa, pendidikan nilai dan moral, pendidikan bela negara, pendidikan politik, dan pendidikan hukum (Sapriya, 2007).

Berdasarkan kajian dari (Banks, 2017) tentang kegagalan kewarganegaraan dan transformasi pendidikan kewarganegaraan, maka pada masa global peran sekolah sangat penting dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan yang telah gagal menjadikan warga negara

yang efektif dan partisipatif. Oleh karena itu fokus utama dalam *Social Studies* adalah *Civic Education* yaitu belajar berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut (Jarolimek, John and Parker, 1993) bahwa misi utama dari *Social Studies* ialah membantu peserta didik belajar tentang dunia sosial dimana mereka berada dan bagaimana cara belajar memecahkan realitas sosial, dan mengembangkan melalui pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) yang diperlukan untuk membentuk manusia yang berkarakter cerdas (*smart*).

Dengan misi utama *Social Studies* tersebut di atas, maka relevan dengan komponen utama *Civic Education* dari konsep (CCE, 1994) yaitu konsepsi dan budaya kewarganegaraan (*civic virtue and civic culture*) yang meliputi: "Penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), keyakinan diri kewarganegaraan (*civic confidence*), komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), dan kemampuan kewarganegaraan (*civic competence*).

Dari kajian tersebut di atas, maka dapat dianalisis implementasi pengembangan komponen utama *Civic Education* tersebut adalah: *Civic knowledge* berkaitan dengan misi apa yang seharusnya warga negara atau peserta didik ketahui. *Civic skills* adalah keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara atau peserta didik yang meliputi: keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan *civic disposition* adalah berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan tingkatkan dalam demokrasi konstitusional di Indonesia. Ketiga komponen *Civic Education* berkaitan erat dengan misi pembentukan pribadi di era global. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (*civic confidence*), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (*civic competence*), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara

yang komitmen (*civic commitment*) sehingga warga negara atau peserta didik yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara *smart* dan *good citizenship* (W Winarno, 2013).

Oleh karena itu urgensi Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah membentuk generasi muda atau warga negara yang cerdas (*smart*) dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan generasi muda atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*) adalah menjadi indikator dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan (Winarno Winarno, n.d.).

Pengembangan pribadi berkarakter cerdas berbasis pada harkat dan martabat manusia yang ditanamkan sebagai nilai-nilai luhur pancasila dan ditempatkan materi kecerdasan dalam rangka membangun pribadi utuh berkarakter cerdas. Upaya pengembangan karakter cerdas tersebut merupakan wujud dari pemenuhan amanat Undang-undang Dasar, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa (Prayitno & Manullang, 2011). Sedangkan menurut (Lickona, 2004) menyatakan bahwa: “*Character is made up of core etical values that incorporate ones thought process, emotion and action*”.

Maksud dari teori Lickona adalah karakter terbentuk dari nilai-nilai etika inti yang menyertakan kesatuan proses berfikir, emosi dan tindakan. Hal yang sama dikemukakan oleh (Berkowitz et al., 2020), bahwa terdapat 8 karakter dasar yang dapat dikembangkan yaitu jujur (*honesty*), keberanian atau keteguhan hati (*corage*), hormat (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), tekun (*perseverance*), kerjasama (*cooperation*), mampu mengendalikan diri (*self-control*) dan bela Negara (*citizenship*).

Pendidikan karakter lazimnya bersifat khas individual sehingga pendidikan karakter perlu memperhatikan potensi diri yang dimiliki individu atau berbasis potensi diri. Berdasarkan kajian teori (Larry P. N, 2014) bahwa: “Pendidikan karakter berbasis potensi diri (individu) merupakan pendidikan

yang tidak saja membimbing dan membina setiap anak didik untuk memiliki kompetensi intelektual, keterampilan mekanik, produktif, inovatif, dan pembangunan karakter”.

Dari kajian tersebut dapat dianalisis bahwa pendidikan generasi muda berorientasi pada karakter berbasis potensi diri dengan tujuan yang diinginkan adalah adanya perubahan sikap yang semula kontraproduktif menjadi kreatif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, adapun yang menjadi penutup dalam tulisan ini bahwa komponen yang terpenting dari nilai-nilai tradisi transimisi kewarganegaraan dalam *social studies* ialah bagaimana supaya peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai pengetahuan, nilai tingkah laku dan nilai-nilai kekayaan budaya secara rasional dan kritis (*critical thinking*) atau secara *inquiri* khususnya diantara teman-temannya. Namun demikian pertimbangan dengan rasional dan kritis tidaklah memadai tanpa didukung oleh pertimbangan keimanan (*beliefs*), dan sikap (*attitudes*).

Misi utama dari *Social Studies* ialah membantu peserta didik belajar tentang dunia sosial dimana mereka berada dan bagaimana cara belajar memecahkan realitas sosial, dan mengembangkan melalui pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) yang diperlukan untuk membentuk manusia yang berkarakter cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).

DAFTAR PUSTAKA

Amanullah, M. A., Suryani, N., & Ardianto, D. T. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) sebagai Sarana Mewujudkan Warga Negara yang Beradab (Good Citizenship)*.

- Banks, J. A. (2017). Failed citizenship and transformative civic education. *Educational Researcher*, 46(7), 366–377.
- Barr, R.D., Barth, J.L., & Shermis, S. . (1977). *Defening the Social Studies*. National Council for the Social Studies.
- Berkowitz, M. W., Lickona, T., Nast, T., Schaeffer, E., & Bohlin, K. (2020). THE ELEVEN PRINCIPLES OF EFFECTIVE CHARACTER EDUCATION: A Brief History. *Journal of Character Education*, 16(2), 1–10.
- CCE. (1994). *National Standard for Civic and Government*. Calabasas.
- Effendi, R. (2012). Perspektif Dan Tujuan Pendidikan IPS. *Modul Pengembangan Pendidikan IPS: UPI Bandung*.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Civic education: antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ine Kusuma & Markum Susatim. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Ghalia Indonesia.
- Jarolimek, John and Parker, W. C. (1993). *Social Studies in Elementary Education* (9th Editio). Macmillan Publishing Company.
- Kamaruddin Hidayat. (2008). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Kencana, Prenada Media Group.
- Larry P. N, D. N. (2014). *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter (Handbook of Moral and Character Education)*. Nusa Media.
- Lickona, T. (2004). *Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues*. Simon and Schuster.
- Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Komunitas Bambu.
- Nasional, D. P. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jakarta: Depdiknas*, 33.
- Prayitno, & Manullang, B. (2011). *Pendidikan karakter dalam pembangunan bangsa*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta Bandung.
- Sapriya, H. (2007). *Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*. *Disertasi Doktor Pada Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Sariyatun. (2019). Pengorganisasian Materi IPS dalam Kurikulum. *MIPS Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9 N.
- Somantri, M. N., Indonesia, U. P., Supriadi, D., & Mulyana, R. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS: menandai 70 tahun usia Prof. Muhammad Numan Somantri, M. Sc., guru besar senior PPS dan FPIPS UPI*. Diterbitkan atas kerjasama Program Pascasarjana dan FPIPS UPI dengan PT
- Suhada, I. (2017). *Konsep Dasar IPS*. Remaja Rosdakarya.
- Susanto, A. (2014). *Pengembangan pembelajaran IPS di SD*. Kencana.
- Winarno, W. (2013). *Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan: Isi, strategi, dan penilaian*. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Winarno, Winarno. (n.d.). *Karakter Warga Negara Yang Baik Dan Cerdas*. *PKN Progresif*, 7(1), 159625.
- Winataputra, U. (2001). *Apa dan Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan*. *Sawangan Depok*.
- Wuryandani & Fathurrohman. (2012). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Ombak.